

Analisis dampak program makan bergizi gratis terhadap risiko pembiayaan bank syariah di Indonesia melalui peningkatan aktivitas sektor ekonomi

Keysya Valentina Aulia

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: icaico1543@gmail.com

Kata Kunci:

Program makan bergizi gratis; sektor ekonomi; risiko pembiayaan; bank syariah; npf.

Keywords:

Free nutritious meal program; economic sector; financing risk; islamic bank; npf.

ABSTRAK

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan pemerintah yang dirancang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mendorong pertumbuhan sektor ekonomi, terutama pada sektor pangan, distribusi, dan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Implementasi program MBG dapat meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat sehingga mendorong kebutuhan pembiayaan dari lembaga keuangan, termasuk perbankan syariah. Namun, peningkatan pembiayaan tersebut juga berpotensi menimbulkan risiko perbankan, khususnya risiko pembiayaan yang tercermin melalui Non-Performing Financing (NPF). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak Program Makan Bergizi Gratis

terhadap risiko pembiayaan bank syariah di Indonesia melalui peningkatan aktivitas sektor ekonomi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur yang bersumber dari berbagai jurnal terkait program MBG, sektor ekonomi, UMKM, serta manajemen risiko perbankan syariah yang berasal dari jurnal umum dan jurnal UIN Malang. Hasil kajian menunjukkan bahwa program MBG berpotensi meningkatkan aktivitas ekonomi dan membuka peluang pembiayaan bank syariah pada sektor pangan dan UMKM, namun juga dapat meningkatkan risiko pembiayaan akibat ketergantungan pada kebijakan pemerintah, ketidakpastian pendapatan usaha, serta potensi terjadinya pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu, bank syariah perlu menerapkan strategi manajemen risiko yang lebih adaptif agar stabilitas keuangan tetap terjaga. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami hubungan antara kebijakan pemerintah dan risiko perbankan syariah sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan ekonomi nasional.

ABSTRACT

The Free Nutritious Meal Program (MBG) is a government policy aimed at improving human resource quality while simultaneously encouraging economic growth, particularly in the food, distribution, and micro, small, and medium enterprise (MSME) sectors. The implementation of this program is expected to increase economic activity, which in turn drives financing demand from financial institutions, including Islamic banks. However, the growth in financing may also lead to banking risks, especially financing risk reflected in Non-Performing Financing (NPF). This study aims to examine the impact of the Free Nutritious Meal Program on Islamic bank financing risk in Indonesia through increased economic sector activity. This research employs a qualitative approach using a literature review method by analyzing various journals related to the MBG program, economic sector development, MSMEs, and Islamic banking risk management from general journals and UIN Malang journals. The findings indicate that the MBG program has the potential to stimulate economic activity and expand Islamic bank financing in the food and MSME sectors, while also increasing financing risk due to dependence on government policies, unstable business income, and the possibility of non-performing financing. Therefore, Islamic banks need to adopt adaptive



risk management strategies to maintain financial stability. This study contributes to understanding the relationship between government policy and Islamic banking risk in supporting national economic resilience.

Pendahuluan

Perbankan syariah memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui penyaluran pembiayaan kepada sektor riil, khususnya usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), sektor pangan, serta industri produktif lainnya. Dalam menjalankan fungsinya, bank syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada prinsip keadilan, kemaslahatan, dan stabilitas ekonomi (Arfan, 2025). Namun, aktivitas pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah tidak terlepas dari berbagai risiko, terutama risiko pembiayaan yang tercermin dalam meningkatnya *Non-Performing Financing (NPF)*. Risiko pembiayaan menjadi salah satu tantangan utama bagi perbankan syariah karena berkaitan langsung dengan kemampuan nasabah dalam mengembalikan dana yang telah disalurkan, sehingga dapat mempengaruhi stabilitas keuangan bank (Arfan et al., 2016).

Di sisi lain, pemerintah Indonesia saat ini sedang mendorong berbagai program strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi, salah satunya adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus mendorong aktivitas ekonomi melalui peningkatan permintaan bahan pangan, distribusi logistik, serta penguatan sektor UMKM. Implementasi program MBG membutuhkan keterlibatan berbagai sektor ekonomi, seperti petani, pelaku usaha catering, distributor bahan pangan, dan pelaku UMKM lainnya, yang secara tidak langsung membutuhkan dukungan pembiayaan dari lembaga keuangan, termasuk bank syariah. Dengan meningkatnya aktivitas sektor ekonomi akibat program MBG, maka kebutuhan pembiayaan juga akan meningkat, sehingga berpotensi mempengaruhi tingkat risiko pembiayaan perbankan syariah.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa program kebijakan pemerintah memiliki pengaruh terhadap aktivitas ekonomi dan sektor keuangan (Abdianti et al., 2023). Penelitian mengenai program Makan Bergizi Gratis menunjukkan bahwa kebijakan tersebut dapat mendorong pertumbuhan sektor ekonomi, meningkatkan daya beli masyarakat, serta memperkuat sektor UMKM dan industri pangan. Penelitian lain juga menjelaskan bahwa kebijakan ekonomi pemerintah dapat memberikan *multiplier effect* terhadap sektor keuangan dan industri produktif (Nabilah & Addainuri, 2025). Di sisi lain, penelitian (Cania et al., 2026) menunjukkan bahwa peningkatan pembiayaan pada sektor riil berpotensi meningkatkan risiko pembiayaan apabila tidak diikuti dengan manajemen risiko yang baik. Studi (Sari et al., 2026) juga menegaskan bahwa risiko pembiayaan, risiko likuiditas, dan risiko operasional menjadi faktor utama yang mempengaruhi stabilitas keuangan bank syariah.

Meskipun telah banyak penelitian yang membahas program Makan Bergizi Gratis dan risiko perbankan syariah secara terpisah, namun penelitian yang menghubungkan kebijakan MBG dengan risiko pembiayaan bank syariah masih sangat terbatas. Sebagai

besar penelitian hanya berfokus pada dampak program MBG terhadap sektor ekonomi atau kebijakan publik, sementara penelitian mengenai perbankan syariah lebih menitikberatkan pada manajemen risiko dan stabilitas keuangan tanpa mengaitkannya dengan kebijakan pemerintah secara spesifik. Oleh karena itu, terdapat celah penelitian (*research gap*) yang perlu dikaji lebih lanjut, yaitu bagaimana program Makan Bergizi Gratis sebagai kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi aktivitas sektor ekonomi dan implikasinya terhadap risiko pembiayaan bank syariah di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak Program Makan Bergizi Gratis terhadap risiko pembiayaan bank syariah di Indonesia melalui peningkatan aktivitas sektor ekonomi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan literatur mengenai kebijakan pemerintah dan risiko perbankan syariah, serta menjadi referensi bagi lembaga keuangan dalam mengelola risiko pembiayaan yang berkaitan dengan program ekonomi nasional. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan perbankan syariah dalam mendukung program pembangunan ekonomi secara berkelanjutan tanpa mengabaikan stabilitas keuangan.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan sektor ekonomi, terutama pada sektor pangan, distribusi, dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Program ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan kesehatan dan pendidikan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi melalui peningkatan permintaan bahan pangan dan keterlibatan pelaku usaha dalam rantai pasok. Implementasi MBG dapat menciptakan efek multiplier terhadap perekonomian karena melibatkan berbagai sektor, seperti petani, distributor, pelaku UMKM, dan industri pangan. Dalam perspektif ekonomi, kebijakan seperti MBG termasuk dalam kebijakan fiskal ekspansif yang bertujuan meningkatkan aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan permintaan barang dan jasa.

Peningkatan aktivitas ekonomi yang dihasilkan dari program MBG akan berdampak pada sektor UMKM dan industri pangan yang menjadi bagian penting dalam perekonomian nasional. UMKM memiliki peran strategis dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sehingga dukungan pembiayaan dari lembaga keuangan menjadi sangat penting. Perbankan syariah memiliki peran sebagai lembaga intermediasi yang menyalurkan dana kepada sektor produktif melalui berbagai akad pembiayaan seperti *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah* (Muttaqien et al., 2025). Dengan meningkatnya aktivitas ekonomi akibat program MBG, maka kebutuhan pembiayaan dari pelaku usaha juga akan meningkat, sehingga bank syariah memiliki peluang untuk memperluas penyaluran pembiayaan pada sektor riil. Namun, peningkatan pembiayaan harus diimbangi dengan pengelolaan risiko yang baik agar tidak menimbulkan pembiayaan bermasalah.

Berdasarkan kajian literatur tersebut, dapat dipahami bahwa program MBG berpotensi mendorong aktivitas sektor ekonomi yang pada akhirnya meningkatkan kebutuhan pembiayaan bank syariah. Peningkatan pembiayaan tersebut dapat berdampak pada meningkatnya risiko pembiayaan apabila tidak diimbangi dengan

manajemen risiko yang baik. Oleh karena itu, hubungan antara program MBG, aktivitas sektor ekonomi, dan risiko pembiayaan bank syariah menjadi penting untuk dikaji dalam penelitian ini sebagai upaya memahami dampak kebijakan pemerintah terhadap stabilitas perbankan syariah di Indonesia.

Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki potensi besar dalam mendorong aktivitas sektor ekonomi, khususnya pada sektor pangan, pertanian, distribusi, dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu, kebijakan pemerintah yang bersifat fiskal dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan permintaan barang dan jasa. Peningkatan permintaan tersebut akan mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan produksi, memperluas usaha, serta membutuhkan tambahan modal dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa sektor UMKM dan sektor riil memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi serta menjadi sektor utama dalam penyaluran pembiayaan bank syariah.

Peningkatan aktivitas sektor ekonomi akibat program MBG berpotensi meningkatkan kebutuhan pembiayaan dari perbankan syariah. Bank syariah sebagai lembaga intermediasi memiliki peran dalam menyalurkan dana kepada sektor produktif melalui berbagai akad pembiayaan seperti *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah*. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa peningkatan aktivitas sektor riil akan mendorong pertumbuhan pembiayaan bank syariah karena pelaku usaha membutuhkan modal kerja untuk menjalankan usaha mereka. Hal ini menunjukkan bahwa program MBG dapat menjadi peluang bagi bank syariah untuk meningkatkan penyaluran pembiayaan, khususnya pada sektor pangan dan UMKM yang terlibat dalam program tersebut.

Namun, peningkatan pembiayaan tidak selalu memberikan dampak positif apabila tidak diimbangi dengan manajemen risiko yang baik. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa peningkatan pembiayaan pada sektor tertentu dapat meningkatkan risiko pembiayaan, terutama jika sektor tersebut memiliki ketergantungan terhadap kebijakan pemerintah atau memiliki tingkat ketidakpastian yang tinggi. Risiko pembiayaan dalam perbankan syariah biasanya diukur melalui Non-Performing Financing (NPF), yang mencerminkan tingkat pembiayaan bermasalah. Tingginya NPF dapat menurunkan stabilitas keuangan bank syariah dan mempengaruhi kinerja keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, bank syariah perlu melakukan analisis kelayakan usaha dan monitoring pembiayaan secara ketat agar risiko pembiayaan dapat dikendalikan.

Program MBG memiliki keterkaitan tidak langsung dengan risiko pembiayaan bank syariah melalui peningkatan aktivitas sektor ekonomi. Ketika program MBG berjalan, permintaan bahan pangan dan jasa akan meningkat, sehingga pelaku usaha membutuhkan pembiayaan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan distribusi. Kondisi ini akan meningkatkan penyaluran pembiayaan bank syariah pada sektor

tersebut. Namun, apabila program MBG mengalami perubahan anggaran atau penghentian kebijakan, maka pelaku usaha yang bergantung pada program tersebut berpotensi mengalami penurunan pendapatan, sehingga kemampuan dalam mengembalikan pembiayaan menjadi terganggu. Hal ini dapat meningkatkan risiko pembiayaan dan berpotensi meningkatkan NPF pada bank syariah.

Penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi, dan stabilitas sektor usaha memiliki pengaruh terhadap risiko pembiayaan bank syariah. Bank syariah yang menyalurkan pembiayaan pada sektor yang stabil dan memiliki permintaan yang tinggi cenderung memiliki risiko pembiayaan yang lebih rendah dibandingkan dengan sektor yang memiliki ketidakpastian tinggi. Dalam konteks program MBG, sektor pangan dan UMKM memiliki peluang pertumbuhan yang besar, tetapi juga memiliki risiko apabila tidak didukung oleh kebijakan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, bank syariah perlu melakukan diversifikasi pembiayaan serta menerapkan manajemen risiko yang adaptif agar dapat memanfaatkan peluang dari program MBG tanpa meningkatkan risiko pembiayaan secara berlebihan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program MBG memiliki dampak positif terhadap sektor ekonomi dan pembiayaan bank syariah, namun juga memiliki potensi risiko terhadap pembiayaan apabila tidak diimbangi dengan manajemen risiko yang baik. Program MBG dapat menjadi peluang bagi bank syariah untuk meningkatkan penyaluran pembiayaan pada sektor produktif, tetapi juga memerlukan strategi pengelolaan risiko yang efektif agar stabilitas keuangan tetap terjaga. Dengan demikian, keterkaitan antara program MBG, sektor ekonomi, dan risiko pembiayaan bank syariah menjadi penting untuk diperhatikan dalam perumusan kebijakan dan strategi perbankan syariah di Indonesia.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil kajian literatur, dapat disimpulkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki peran penting dalam mendorong peningkatan aktivitas sektor ekonomi, khususnya pada sektor pangan, distribusi, dan UMKM. Peningkatan aktivitas ekonomi tersebut berdampak pada meningkatnya kebutuhan pembiayaan dari perbankan syariah, sehingga membuka peluang bagi bank syariah untuk memperluas penyaluran pembiayaan pada sektor produktif.

Namun demikian, peningkatan pembiayaan tersebut juga diikuti dengan potensi meningkatnya risiko pembiayaan yang tercermin dalam Non-Performing Financing (NPF). Risiko ini muncul akibat ketergantungan pelaku usaha terhadap program pemerintah, ketidakstabilan pendapatan usaha, serta kemungkinan perubahan kebijakan yang dapat mempengaruhi kemampuan nasabah dalam mengembalikan pembiayaan. Oleh karena itu, meskipun program MBG memberikan peluang ekonomi yang besar, tetap diperlukan pengelolaan risiko yang baik agar stabilitas keuangan bank syariah tetap terjaga.

Sejalan dengan hal tersebut, disarankan agar perbankan syariah menerapkan manajemen risiko yang lebih adaptif melalui analisis kelayakan usaha yang lebih ketat,

monitoring pembiayaan secara berkelanjutan, serta diversifikasi sektor pembiayaan. Pemerintah juga diharapkan mampu menjaga konsistensi dan keberlanjutan program MBG agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha. Selain itu, pelaku UMKM perlu meningkatkan kemandirian usaha dan tidak bergantung sepenuhnya pada program pemerintah. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menggunakan pendekatan kuantitatif agar dapat mengukur secara lebih akurat pengaruh program MBG terhadap risiko pembiayaan bank syariah.

Daftar Pustaka

- Abdianti, D., Restu, A., Al Ayyubi, S., & Hidayat, F. (2023). Konsep kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam. *Trending: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi*, 1(3), 213–226.
- Arfan, A. (2025). *Inisiatif Bank Indonesia dalam perencanaan pengembangan perbankan syariah*. <https://repository.uin-malang.ac.id/23336/>
- Arfan, A., Saifullah, S., & Fakhruddin, F. (2016). Implementasi prinsip bagi hasil dan manajemen risiko dalam produk-produk pembiayaan perbankan syariah di Kota Malang. *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 10(1), 213–238. <https://repository.uin-malang.ac.id/622/>
- Cania, R. F., Elvira, R., Imamuddin, M., & Gusrianti, G. (2026). Implementasi Manajemen Risiko dalam Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada BPRS Haji Miskin Pandai Sikek. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 12926–12933.
- Muttaqien, M. K., Mas'ud, T., Matondang, M. R. P., & Wicaksono, A. T. S. (2025). Sosialisasi Manfaat Menggunakan Layanan Perbankan Syariah. *Jumat Ekonomi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(2), 65–70. <https://repository.uin-malang.ac.id/24690/>
- Nabilah, I. Z., & Addainuri, M. I. (2025). Peran Pemerintah dalam Menyeimbangkan Subsidi Sebagai Kebijakan Fiskal Untuk Mendukung Perekonomian Tiga Sektor. *Jurnal Manajemen Ekonomi Dan Bisnis*, 1(2).
- Sari, A. P., Husnah, T. N., & Fadlilah, N. (2026). Manajemen Resiko Dalam Perspektif Perbankan Syariah: Kajian Literatur. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi*, 5(1), 151–162.